

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN PADA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KOTA BEKASI**

***LIBRARY ORGANIZATION POLICY IMPLEMENTATION AT THE
ARCHIVES AND LIBRARY OFFICE OF BEKASI CITY***

Siti Fatimah

NPM. 208010046

Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Pasundan, Indonesia

Koresponden email: fety.fatimah@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan perpustakaan menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya membangun minat baca masyarakat melalui penyediaan sumber ilmu dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan perpustakaan sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang berliterasi tinggi serta menjadi dasar hukum dalam mengembangkan perpustakaan di Daerah Kota Bekasi secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menyusun Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Artikel ini bertujuan untuk melihat implementasi dan kinerja kebijakan penyelenggaraan perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Implementasi kebijakan ini menggunakan acuan teoritis Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, serta dilakukan analisis sevara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat implementasi dan kinerja kebijakan tentang penyelenggaraan perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi belum berjalan dengan baik yaitu kompetensi, kapabilitas serta kuantitas SDM Disarpusda masih kurang memadai; tidak semua aparatur memahami tujuan dan sasaran kinerja dinas sehingga aparatur tersebut tidak mengetahui pekerjaan yang harus dilakukannya; Standar Operational Procedur (SOP) telah tersedia, namun tidak semua aparatur memahaminya; terdapat kendala berupa masih kurang intensitas dalam proses penyampaian informasi; terlihat tingginya tingkat mutasi pegawai yang mengakibatkan kebijakan ini kurang berjalan dengan baik.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, kebijakan perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan

Organizing a library is one of the government's policies in an effort to build community reading interest through the provision of sources of knowledge and information that are easily accessible by community. In order to optimize the function and role of the library that can create a highly literate society in Bekasi City and become a legal basis for developing libraries in the Bekasi City in a quality, integrated and sustainable manner. Disarpusda of Bekasi City drafted Bekasi City Regional Regulation Number 18 of 2019 concerning Library Organization. This

article aims to review the implementation and performance of library management policies at the Archives and Library Office of Bekasi City. The implementation of this policy used Van Meter and Van Horn's theoretical references which consist of six variables that influence the implementation of a policy. Data were collected through interviews, documentation and observation, and qualitative analysis was carried out using a descriptive approach. The results of the research obtained indicate that there are several factors that make the implementation and performance of policies regarding library management at the Archives and Library Office of Bekasi City not going well, namely the competence, capability and quantity of Disarpusda human resources are still inadequate; not all apparatus understand the goals and objectives of the service performance so that these apparatus do not know the work they have to do; Standard Operational Procedures (SOP) are available, but not all apparatus understand them; there are obstacles in the form of lack of intensity in the process of conveying information; the high rate of employee turnover has resulted in this policy not working well.

Keywords: Policy implementation, library policy, reading interest

PENDAHULUAN

Peran perpustakaan dibutuhkan dalam mewujudkan masyarakat berliterasi tinggi dan meningkatkan peran literasi dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian Misi Kota Bekasi Periode Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif” dengan Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah “mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia” dengan sasaran tujuan tersebut yaitu “tercapainya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif” melalui arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu “peningkatan layanan perpustakaan dan pengembangan literasi”. (Lia Muliawaty, 2019)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan disusun oleh Disarpusda Kota Bekasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan perpustakaan sehingga

dapat mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang berliterasi tinggi serta menjadi dasar hukum dalam mengembangkan perpustakaan di Daerah Kota Bekasi secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Disarpusda sebagai agen pelaksana urusan perpustakaan di Kota Bekasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan menjalankan 1 (satu) program yaitu Pembinaan Perpustakaan. Program tersebut terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi yang mana menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disarpusda, dan kemudian diturunkan tiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Disarpusda. Dalam upaya meningkatkan masyarakat berpengetahuan tinggi, Disarpusda melaksanakan berbagai kegiatan seperti peningkatan pengelolaan perpustakaan guna meningkatkan perpustakaan yang aktif serta melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat guna meningkatkan pengunjung perpustakaan.

Penerapan dari kebijakan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana yang disebutkan dalam

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perpustakaan ini tidak lepas dari beberapa masalah. Dalam observasi awal peneliti menemukan empat masalah yang terjadi pada proses tersebut yakni :

1. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dimana implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Dukungan dapat berupa ketersediaan sumber daya ekonomi untuk kelancaran implementasi kebijakan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) menghadapi kendala yaitu dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan sangat minim terlihat dari rasio anggaran tahun 2021 Disarpusda sebesar Rp. 15.851.568.100 dengan belanja pada APBD Kota Bekasi sebesar Rp.6.113.945.828.498,-, terlihat rasio anggaran yang diperoleh Disarpusda Kota Bekasi sebesar 0.26% dari APBD Kota Bekasi. Selain itu rendahnya minat baca masyarakat Kota Bekasi karena perkembangan teknologi informasi termasuk kondisi sosial yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini.
2. Kelemahan institusi. Institusi merupakan organisasi pelaksana penentu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hal ini berarti bahwa terdapat berbagai kegiatan baik itu sosialisasi kebijakan, pengetahuan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Tetapi terkadang hal ini menjadi hambatan ketika para pelaksana belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Ketidakmampuan sumber daya manusia pelaksana kebijakan dapat

dikategorikan pada bidang teknis dan administratif yang kadang kala membuat masyarakat kebingungan ketika ada sebuah kebijakan-kebijakan yang baru, dimana ini sangat erat kaitannya dengan pemberitahuan kebijakan maupun program-program baru yang mana akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

4. Peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasinya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Pergantian kepala dinas serta pejabat lainnya pada Disarpusda mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini, karena pejabat pengganti membutuhkan waktu untuk memahami secara mendalam dan pelaksana akan cenderung mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atasannya masing-masing atau mengikuti petunjuk dari atasan yang mempunyai pengaruh paling kuat atas eksistensi pelaksana dalam jangka panjang sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier.

Peneliti tertarik untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan perpustakaan pada Disarpusda Kota Bekasi. Disarpusda merupakan salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan khususnya Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Kota Bekasi serta sebagai penyelenggara Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di atas, implementasi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi belum

berjalan dengan baik, sehingga Peneliti ingin mengkaji permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam bentuk penelitian yang berfokuskan pada “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi”

METODE

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode semacam ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara kualitatif, bagaimana persepsi atau pandangan aparatur dan masyarakat terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Seluruh data diperoleh langsung dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi literature.

Penelitian ini mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Informasi yang dikumpulkan adalah dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka bertindak laku dalam konteks natural. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrument kunci dimana peneliti mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi pelaku, atau wawancara dengan para partisipan. Peneliti memilih untuk mengumpulkan data dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya akan direview kembali dengan memberikannya makna dan mengolahnya ke dalam kategori atau tema yang melintasi semua data. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif, dimana peneliti membangun pola, kategori, dan tema dari bawah ke

atas dengan mengolah ke dalam unit informasi yang lebih abstrak.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan yang berasal dari para informan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan pencarian data dipusatkan pada informasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumentasi pada sub bagian perencanaan selaku penyusun perencanaan dan pelaporan kinerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, dan buku teks yang relevan dengan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Bekasi.

Jumlah informan yang dibutuhkan disesuaikan dengan memperhatikan apa yang ingin diketahui sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan, dukungan sumber daya yang dimiliki informan dan peneliti serta setelah terjadi pengulangan informasi dari informan keinforman. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah representasi dari:

- 1) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
 - 2) Kepala Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan pustaka
 - 3) Dosen Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi
 - 4) Subkoordinator pustakawan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
 - 5) Pustakawan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
 - 6) Masyarakat sebagai pemustaka
- Peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan observasi secara

langsung terhadap obyek penelitian serta melakukan pengumpulan data sekunder secara langsung di pusat-pusat kegiatan informan dan melakukan wawancara bebas dan tak berstruktur kepada informan dalam suasana yang kondusif.

Metode penelitian kualitatif tidak menggunakan suatu model statistik (model korelasi antar variabel) seperti yang digunakan dalam penelitian kuantitatif sebagai instrumen untuk menghasilkan output atas data yang dianalisis. Pada proses ini peneliti sebagai instrumen kunci penelitian melakukan interpretasi secara rasional atas data empiris yang dikumpulkan dikategorikan secara sistematis. Jadi karena instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri maka penjelasan yang dikemukakan oleh peneliti sebagai output data yang diproses dalam kepala (pikiran) peneliti haruslah rasional (masuk akal). Dalam penelitian setelah peneliti memperoleh data dalam bentuk ungkapan-ungkapan (kata-kata) dari para informan lalu dilakukan proses reduksi dan klasifikasi maka akhirnya peneliti menelaah secara rasional dan menyimpulkan kata-kata (data) tersebut dalam bentuk makna-makna sebagaimana yang diuraikan secara lengkap dalam hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan adalah bentuk penerapan dari tugas pokok Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi (Disarpusda) selaku badan publik yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Kota Bekasi. Kebijakan penyelenggaraan perpustakaan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Disarpusda sangat relevan, karena tugas pokoknya yaitu berperan aktif dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perpustakaan serta melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan. Tujuan dan sasaran

kebijakan penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota Bekasi secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Peran Disarpusda sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sesuai Perda Nomor 18 Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah yaitu : a) menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; b) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah; c) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; d) menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; e) memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan f) menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah. Keberadaan perda ini lebih memperkuat fungsi dan kedudukan perpustakaan dalam membangun masyarakat Kota Bekasi sebagai literate society.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Disarpusda Kota Bekasi tersebut dipandang melalui sudut teori implementasi kebijakan dalam hal ini teori yang dipakai oleh peneliti adalah model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dimana dalam model ini ada beberapa faktor kritis yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, yaitu Standar dan Sasaran, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan, Sikap Para Pelaksana, serta

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan pada Disarpusda Kota Bekasi yang terlihat dari hasil wawancara dan observasi.

Standar dan Sasaran

Dalam upaya penyelenggaraan perpustakaan maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Disarpusda telah berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan di Kota Bekasi dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas dan tertuang ke dalam dokumen perencanaannya yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja). Dalam dokumen tersebut telah disusun rencana kegiatan yang akan dilakukan selama 5 tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seperti kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 6 sub kegiatan dan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 5 sub kegiatan. Dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut output pelaksanaannya yaitu untuk peningkatan perpustakaan yang aktif dan peningkatan pengunjung perpustakaan. Untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya dilakukan penghitungan dengan menggunakan indikator indeks membaca masyarakat Kota Bekasi.

Namun ternyata tidak semua aparatur Disarpusda memahami pekerjaan yang perlu dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan dan sasaran dinas. Ditemukan, berdasarkan observasi, budaya kerja aparatur yang masih ingin menghindari pekerjaan menjadi alasan apatur tidak mau tahu sehingga tidak dipahaminya tujuan dan sasaran kerja dinas.

Sumber Daya

Proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya manusia itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan.

Perpustakaan dapat diselenggarakan secara optimal apabila tersedia jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan yang cukup. Jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan sangat menentukan keberhasilan layanan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas tenaga perpustakaan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepuasan pemustaka. Kualitas tenaga perpustakaan dilihat dari kompetensi dan profesionalisme. Kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kepeustakawanan, serta melalui evaluasi kualitas tenaga perpustakaan melalui uji kompetensi dan assesmen sertifikasi.

Tenaga pengelola perpustakaan mempunyai peran penting dalam mewujudkan semua kegiatan yang terdapat di perpustakaan. Tenaga pengelola perpustakaan mempunyai tugas utama yaitu mencari, menghimpun, mengelola, menyajikan dan menyebarluaskan informasi yang terdapat di perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh pengguna. Tenaga pengelola dituntut agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Akan tetapi pada saat ini masih banyak yang bekerja asal-asalan karena masih menganggap profesinya hanya sebagai penjaga perpustakaan. Kurangnya pemahaman tenaga pengelola perpustakaan terhadap perannya dapat merusak citra dari perpustakaan. Perlunya pengetahuan

untuk tenaga pengelola perpustakaan terhadap pekerjaannya dapat membangun dan menanamkan image positif bagi perpustakaan.

Hasil penelitian ditemukan tidak adanya kekurangan anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan, tapi kesiapan SDM dalam mengelola dan merencanakan anggaran yang masih kurang sehingga menghambat dalam pengembangan penyelenggaraan perpustakaan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn (1975:471), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggara administrasi pemerintahan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), penyelenggara administrasi pemerintah dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintah, hal tersebut dapat ditemukan penyebab dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), maka secara bertahap kualitas publik akan lebih profesional, cepat dan mudah.

Hasil observasi terlihat Disarpusda telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk

pelaksanaan pelayanannya seperti SOP Layanan Peminjaman Buku Perpustakaan dan SOP Layanan Pengembalian Buku Perpustakaan, SOP Layanan Pembuatan Kartu Anggota, SOP Pengolahan Koleksi Buku Perpustakaan, SOP Pengajuan Pengadaan Bahan Perpustakaan, SOP Pengadaan Bahan Perpustakaan dengan Pembelian, SOP Pembinaan Tenaga Perpustakaan, SOP Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan, SOP Evaluasi dan Monitoring Pojok Baca, SOP Pelaksanaan Pameran Perpustakaan dan SOP Pelaksanaan Promosi Perpustakaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, namun belum semua aparatur memahami SOP yang telah ditetapkan. Para aparatur dalam melaksanakan pelayanannya berdasarkan kebiasaan sehari-hari yang mereka kerjakan belum berpedoman ke SOP sehingga terkadang terjadi *human error* yang menyebabkan prosedur yang telah ditetapkan tidak terlaksana dengan baik.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan

Standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*) sebagai penanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Dalam berbagai program implementasi kebijakan, dibutuhkan hubungan yang baik antar instansi yang terkait dalam bentuk koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Jangan sampai terjadi miskomunikasi dalam hal apapun apalagi dalam penyampaian kebijakan yang akan

diberlakukan, karena semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan, petunjuk pelaksanaan perintah dan lain-lain. Sehingga komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal terjadi antar pejabat struktural pada Disarpusda dengan sub koordinator, pustakawan serta pelaksana bidang perpustakaan. Komunikasi internal ini disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan non-formal seperti perintah langsung atasan terhadap bawahan.

Hasil penelitian ditemukan proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi masih kurang intensitasnya, perbedaan kemampuan implementator dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan diartikan sebagai penerimaan atau penolakan pelaksana kebijakan dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan diimplementasikan. Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang terdiri atas respon dari implementer terkait kebijakan, kesadaran maupun pemahaman dari pelaksana terkait dengan kebijakan, serta intensitas dari disposisi implementor yaitu keberpihakan nilai yang dimiliki implementer.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:473), ada beberapa alasan

mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Dengan gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan – bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Van Meter dan Van Horn (1975:472) menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja atau bahkan keberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Lingkungan sosial dapat terlihat dari nilai Tingkat Gemar Membaca

masyarakat Kota Bekasi Tahun 2021 yakni 39.18. Artinya bahwa masyarakat Kota Bekasi masih berada pada kategori rendah dalam hal kegemaran membaca. Berdasarkan hasil kajian Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi Tahun 2021, ditemukan bahwa masyarakat Kota Bekasi belum membaca buku maupun bacaan non buku secara intensif dan frekuentif.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan masyarakat Kota Bekasi hanya sebagian kecil yang mengetahui, mendukung, berkontribusi dan mendayagunaka perpustakaan dikarenakan keberadaan perpustakaan yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat dan perpustakaan belum menjadi sarana publik yang membanggakan masyarakat.

Dalam lingkungan ekonomi terlihat dari besaran Pendapatan Anggaran Daerah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pengembangan perpustakaan. Namun masih diperlukan SDM Perpustakaan yang kompeten, profesional, dan berjiwa penggiat literasi yang mampu mengeksekusi kebijakan yang ada dan mensinkronisasikannya dengan visi, misi dan kepentingan politik kepala daerah dalam berbagai program pembangunan dan kegiatan dengan berorientasi pada kemajuan masyarakat dan daerah.

Kondisi politik yang terjadi pada Pemerintahan Kota Bekasi juga turut menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan ini. ergantian Kepala Dinas yang setiap tahun terjadi mempengaruhi pengambilan kebijakan dan implementasi peraturan daerah penyelenggaraan perpustakaan. Menurut Mazmania dan sabatier (dalam Wahab, 2001:78) menyebutkan pelaksana akan cenderung mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atasannya masing-masing atau mengikuti petunjuk dari atasan yang mempunyai pengaruh paling

kuat atas eksistensi pelaksana dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan berupa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Disarpusda Kota Bekasi, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, telah menyusun program-program yang akan dilakukan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunannya (Renja). Namun tidak semua aparatur memahami tujuan dan sasaran kinerja dinas, beberapa aparatur tidak memahami pekerjaan yang harus dilakukannya untuk membantu pencapaian tujuan dan sasaran dinas. Hal ini terjadi karena budaya kerja aparatur yang masih ingin menghindari pekerjaan sehingga apatur tidak mau tahu tujuan dan sasaran kerja dinas.
2. Keberhasilan proses implementasi kebijakan Disarpurda sangatlah bergantung kepada kemampuan pemanfaatan sumber daya yang disediakan. Sumber daya manusia masih terdapat kendala karena sebagian besar aparatur belum memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup serta jumlah tenaga teknis yang membantu memberikan pelayanan teknis kurang. Sumber daya finansial, anggaran yang diperoleh Disarpusda untuk melaksanakan urusan perpustakaan terjadi peningkatan pasca pandemi covid-19.
3. Struktur organisasi Disarpusda tersebut terlihat sistem kerja yang

sederhana dengan mengedepankan kerja tim yang fokus pada hasil. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien Disarpusda telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan pelayanannya, namun belum semua aparatur memahami SOP yang telah ditetapkan. Para aparatur dalam melaksanakan pelayanannya berdasarkan kebiasaan sehari-hari yang mereka kerjakan belum berpedoman ke SOP sehingga terkadang terjadi human error yang menyebabkan prosedur yang telah ditetapkan tidak terlaksana dengan baik.

4. Komunikasi internal terjadi antar pejabat struktural pada Disarpusda dengan sub koordinator, pustakawan serta pelaksana bidang perpustakaan. Komunikasi internal ini disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan non-formal seperti perintah langsung atasan terhadap bawahan. Komunikasi eksternal terjadi diantara unsur Disarpusda dengan Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan dan pengelola perpustakaan serta para pegiat literasi yang ada di Kota Bekasi. Namun ditemukan proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan penyampaian informasi masih kurang intensitasnya, perbedaan kemampuan implementator dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.
5. Sikap para pelaksana kebijakan Disarpusda adalah penerimaan menjalankan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil observasi dan wawancara terlihat hanya beberapa pustakawan yang memahami alur kerja penyelenggaraan perpustakaan,

yang lain menunggu arahan dari pustakawan tersebut. Dalam tanggapan dan intensitas kebijakan tidak terdapat penolakan dari pihak pelaksana program baik dari pimpinan hingga ke staff yang menjalankan program tersebut. Jadi semua mendukung program ini dan berada dalam satu kesepahaman yakni untuk menyukseskan implementasi kebijakan ini.

6. Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan Disarpusda. Rendahnya minat baca masyarakat Kota Bekasi menjadi tugas berat Disarpusda untuk melakukan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat Kota Bekasi serta membangun perspektif masyarakat tentang perpustakaan bukan hanya sekedar gudang buku tapi pusat belajar dan informasi untuk masyarakat Kota Bekasi. Selain itu, terlihat tingginya tingkat mutasi pegawai yang terjadi di Disarpusda Kota Bekasi menyebabkan kebijakan ini kurang berjalan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hardiningtyas, T. (2014). *Perpustakaan Dan Budaya Literer* . Surakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic*

- Policy* Yogyakarta: Analisis. Gava Media.
- Lia Muliawaty. (2019). Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 82-101.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Memahami Pelayanan Publik; Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Muhammad, Feny Irfany dan Yaya M. Abdul Aziz. 2020. *Implementasi Kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot*. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. Bandung
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik : Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Digital 2021. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik : Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Edisi Digital 2021. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- O'Brian, Michael. 2010. *Akreditasi Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Gramedia
- Syahrudin. 2019. *Implementasi kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Tangkilisan, dan Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset
- Tjilen, Alexander Phuk. *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik : Studi Implementasi Program Rencana Strategis Kampung*. Edisi Digital 2020. Bandung: Nusa Media.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wahyuni, Sri. Strategi Kepala Perpustakaan Untuk Memperoleh Akreditasi Perpustakaan sekolah Nasional di Sekolah Dasar Negeri Papar II Kabupaten Kediri. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Yuventia, Yuniwati. 2015. *Merubah Paradigma Perpustakaan Melalui Standar Nasional Perpustakaan*. Jurnal Perpustakaan Libraria Vol 3 No. 2. Kudus.